

NASKAH AKHIR
11 APRIL 2013
Pukul 14.00 WIB



**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA SIDANG III
TAHUN SIDANG 2012-2013**

JUM'AT, 12 APRIL 2013

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2013**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA SIDANG III
TAHUN SIDANG 2012-2013**

JUM'AT, 12 APRIL 2013

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Salam Sejahtera bagi kita sekalian,

Yang kami hormati,

- **Para Wakil Ketua DPR-RI,**
- **Pimpinan Komisi, Badan-Badan, dan Alat Kelengkapan Dewan,**
- **Para Anggota Dewan,**

Alhamdulillah, hari ini Dewan telah menyelesaikan kegiatan Masa Sidang III Tahun Sidang 2012-2013 yang berlangsung selama 67 hari kerja atau 96 hari kalender, sejak 7 Januari 2013 yang lalu. Mulai besok pagi, Dewan memasuki Masa Reses sampai tanggal 12 Mei 2013. Selaku Pimpinan Dewan, saya menyampaikan Pidato Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2012-2013, sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR.

Selain menjalankan tiga fungsi utama DPR, pada Masa Sidang III juga telah dilaksanakan tugas DPR lainnya, di antaranya: pemberian pertimbangan terhadap Calon-Calon Duta Besar Negara Sahabat untuk Republik Indonesia, yaitu Duta Besar Negara Republik Demokratik Federal Ethiopia dan Republik Portugal; pemberian Persetujuan terhadap 8 (delapan) Calon Hakim Agung; pemberian persetujuan terhadap Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) yaitu Perry Warjiyo, Calon Hakim Konstitusi Prof. Arief Hidayat, Dr. HM. Akil Mochtar, dan Calon Gubernur BI Agus Martowardojo.

Saudara Agus Martowardojo sebagai Gubernur BI terpilih diharapkan mampu menangani tugas dan tanggung jawab sebagai otoritas moneter dengan sebaik-baiknya.

Dengan telah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kini Bank Indonesia akan lebih fokus dalam menangani bidang moneter dan makro-ekonomi, yang dalam melaksanakan tugas harus senantiasa berkoordinasi dan bersinergi secara solid dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dengan Menteri Keuangan, Ketua Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan.

Dr. HM. Akil Mochtar yang telah mendapat persetujuan perpanjangan masa tugas oleh DPR, beberapa hari yang lalu telah terpilih untuk memimpin MK periode 2013-2015, menggantikan Prof. Mahfud MD. Dari mimbar ini, saya atas nama DPR RI mengucapkan "selamat", semoga di bawah kepemimpinan Dr. H.M. Akil Mochtar, MK lebih mampu menjalankan fungsi dan peranannya sebagai pengawal konstitusi.

Pada fungsi representasi, Masa Sidang ini, ketika terjadi bencana banjir di beberapa wilayah Ibukota, DPR membentuk Posko Peduli Banjir. Pimpinan DPR melakukan kunjungan langsung ke lokasi banjir, dan menyalurkan berbagai bantuan berbagai bentuk natura yang dibutuhkan para korban. Pimpinan DPR juga menerima kunjungan Ketua MPR dan Gubernur DKI, untuk melakukan koordinasi dan mencari solusi atas bencana banjir yang selalu melanda Jakarta.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Selama Masa Sidang III, Badan Musyawarah DPR-RI telah menetapkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi dialokasikan waktu sebesar 60% dari semua kegiatan, dan sisanya 40% untuk fungsi Pengawasan dan Anggaran. Dengan alokasi tersebut, DPR telah menetapkan 6 (enam) RUU untuk disahkan menjadi UU, yaitu: [1] RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, [2] RUU tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity*, [3] RUU tentang Pengesahan *Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade*, [4] RUU tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, [5] RUU tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara, dan [6] RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 56 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat.

Khusus mengenai kewenangan legislasi, baru-baru ini, Mahkamah Konstitusi (MK) atas permohonan uji materi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terhadap UU No. 27 tahun 2009 tentang MD3, telah memutuskan menegaskan tiga kewenangan DPD dalam bidang legislasi yaitu: menyusun Program Legislasi Nasional, mengusulkan RUU, dan turut membahas RUU. DPR mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi, dan akan memasukkan dalam revisi UU No. 27 tahun 2009 yang sedang dalam proses pembahasan di DPR dan Tata Tertib DPR-RI. Penyempurnaan yang akan dilakukan, tidak pada tataran teknis, tetapi pada tataran kebijakan dan substansi. Adanya keputusan MK ini, diharapkan tidak menjadikan pembahasan RUU lebih berkepanjangan karena banyaknya pihak yang terlibat, tetapi justru harus lebih efektif, efisien dan berkualitas dalam menghasilkan UU yang strategis bagi kepentingan bangsa dan negara. Namun keputusan terakhir atas pembahasan RUU, tetap ada di tangan DPR dan Presiden. Terhadap Keputusan MK tersebut, masih diperlukan koordinasi lebih lanjut.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Ada beberapa RUU yang berkaitan dengan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat yang sedang dalam proses pembahasan saat ini, antara lain RUU Tabungan Perumahan Rakyat (RUU Tapera). RUU ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk mendorong partisipasi masyarakat, memiliki rumah layak huni dengan harga terjangkau. Sasaran dari RUU Tapera adalah, rakyat Indonesia yang belum memiliki rumah, rakyat yang memiliki rumah tetapi tidak layak, dan seluruh masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah. Sementara, RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, juga sedang disiapkan DPR untuk menggantikan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

Selain itu, penyusunan RUU tentang Desa juga tengah menjadi isu yang penting. Fenomena yang berkembang adalah gencarnya tuntutan saudara-saudara kita para perangkat desa untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebenarnya, esensi paling utama dari disusunnya RUU tentang Desa, bukanlah substansi tersebut. Esensi utama atas disusunnya RUU tentang Desa antara lain adalah, *pertama*, pengakuan eksistensi desa dan menjadi pintu gerbang perwujudan kesejahteraan masyarakat desa. *Kedua*, memberikan pengakuan atau penghargaan atas kemajemukan desa yang

disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi lokal. Dan *ketiga*, mengedepankan reformasi perencanaan dan penganggaran pembangunan serta redistribusi berbagai sumber daya ke desa.

Saat ini, Komisi III DPR telah mulai melakukan pembahasan atas RUU yang akan menjadi payung hukum dalam pembangunan hukum di Indonesia, yaitu RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan RUU tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kedua RUU ini sangat diperlukan, karena mengandung misi demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana dan adaptasi, serta harmonisasi terhadap perkembangan hukum yang terjadi akibat perkembangan bidang ilmu pengetahuan hukum pidana, serta nilai-nilai standar dan norma-norma yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab.

RUU tersebut memiliki latar belakang sejarah hukum nasional. KUHP merupakan Undang-Undang warisan pemerintahan Kolonial. Maka kesempatan membentuk KUHP baru ini, merupakan suatu kesempatan emas bagi kita untuk membangun hukum yang sesuai dan cocok dengan jati diri bangsa sendiri.

Demikian pula dengan RUU Hukum Acara Pidana, KUHAP telah dikenal sebagai "karya agung" bangsa Indonesia pada zamannya, namun harus kita akui, bahwa masyarakat selalu mengalami perkembangan dan dinamika, sehingga ketentuan yang dinilai telah ketinggalan zaman yang terdapat dalam KUHAP, harus direvisi.

Revisi yang akan dihasilkan terhadap kedua UU ini, *insya Allah*, akan mampu menjamin keadilan bagi masyarakat dan berdaya laku untuk jangka waktu lama. Melalui revisi KUHP diharapkan, beberapa rumusan tindak pidana yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, tidak diatur lagi. Sementara itu, bentuk-bentuk tindak pidana baru dirumuskan dalam KUHP yang baru. Namun harus dihindari munculnya pasal-pasal karet (*hatzai artikelen*) yang akan menimbulkan persoalan-persoalan baru dalam reformasi hukum kita.

Demikian juga dengan hukum acara pidana, akan menghasilkan Kitab Undang-Undang yang mengayomi kepentingan masyarakat pencari keadilan. Melalui KUHAP yang baru, diharapkan dapat diadopsi prinsip-prinsip baru dalam penyelesaian masalah-masalah pidana seperti mengakomodasi *alternative dispute* dalam penyelesaian perkara pidana melalui prinsip *restorative justice*.

Kedua RUU ini juga sangat terkait dengan RUU tentang Mahkamah Agung dan RUU tentang Kejaksaan yang juga sedang dibahas oleh Komisi III. DPR memiliki komitmen untuk menuntaskan kedua RUU ini mengingat urgensi dalam memperbaiki kedua lembaga tersebut.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Fungsi pengawasan telah dilakukan oleh Komisi-Komisi DPR dengan mengundang mitra-kerja maupun dalam bentuk kunjungan kerja spesifik ke daerah, untuk merespon situasi yang berkembang di masyarakat, baik di bidang politik keamanan, sosial kemasyarakatan maupun masalah ekonomi. Kegiatan lainnya, dilakukan oleh Tim Pengawas yang dibentuk DPR-RI, antara lain Tim Pengawas Century.

Hampir setiap pekan, Tim Pengawas Century melakukan rapat dengan mengundang antara lain Kapolri, Jaksa Agung dan KPK. Rapat Kerja pada tanggal 13 Maret 2013, Tim Pengawas Century mengundang secara bersama-sama Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Kapolri, Jaksa Agung, Dubes RI untuk Swiss, dan Konjen RI di Hongkong, dengan agenda mendengar laporan tentang penanganan pengembalian aset hasil tindak pidana kasus Bank Century yang ada di dalam maupun di luar negeri. Tim berkesimpulan, bahwa penanganan masalah ini belum optimal, dan bahkan langkah-langkah untuk *asset recovery* mengalami banyak kendala.

Oleh karena itu, Tim Pengawas Century meminta agar dilakukan tindakan secara cepat, melakukan terobosan dan menyampaikannya secara periodik perihal aset yang berada di dalam maupun di luar, berapa nilai asetnya dan di mana tempatnya secara spesifik. Tindakan ini harus dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, antara lain KBRI di Swiss dan Konjen RI di Hongkong, atau Perwakilan RI yang ada di luar negeri yang terindikasi adanya aset Bank Century.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Dewan juga melakukan pengawasan terhadap berbagai masalah kesejahteraan rakyat khususnya terkait dengan implementasi dari UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Undang-undang BPJS merupakan komitmen DPR

dan Pemerintah sebagai upaya meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, dan memberikan rasa aman, terutama rakyat miskin sebagai tanggung jawab negara.

Terkait dengan implementasi UU BPJS, saat ini sedang terjadi transformasi PT. Askes menuju BPJS Kesehatan. Ujicoba pelaksanaan jaminan kesehatan nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah dilakukan mulai 1 April tahun ini di Provinsi DKI Jakarta. Ujicoba ini diharapkan menjadi laboratorium pelaksanaan Jamkesmas, yang akan berlaku secara resmi pada tanggal 1 Januari 2014.

Persoalan yang perlu ditangani oleh Pemerintah di antaranya, masalah kualitas sumber daya manusia, sarana-prasarana serta koordinasi antar lembaga. Banyak hal yang harus dilakukan dan dipersiapkan oleh Pemerintah, bukan saja dalam hal teknis, namun juga kesiapan konsep dan semangat perubahan dalam mewujudkan keadilan sosial di bidang pelayanan kesehatan.

Komitmen yang kuat untuk kesejahteraan masyarakat akan didukung Dewan, terutama bagi implementasi transformasi di bidang kesehatan masyarakat. DPR akan mengawal proses transformasi PT. Askes menuju BPJS Kesehatan, sesuai amanat UU.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, Komis-Komisi Dewan telah melaksanakan berbagai Rapat Kerja atau Rapat Dengar Pendapat dengan Pemerintah, yang agendanya antara lain mengevaluasi program kerja dan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012, termasuk mengkritisi realisasi penyerapan anggaran dan Hasil Pemeriksaan Semester I BPK-RI. Dewan juga telah menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II BPK-RI Tahun Anggaran 2012, untuk selanjutnya, BAKN-RI melakukan penelaahan dan menyampaikan hasil telaahan kepada Komisi-Komisi.

Dalam kaitan implementasi APBN Tahun Anggaran 2013 yang sedang berjalan, Dewan terus mengamati dan memantau perkembangan isu-isu ekonomi, antara lain permasalahan subsidi BBM. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa Pemerintah memperkirakan konsumsi BBM akan membengkak hingga 53 juta kiloliter melebihi kuota tahun 2013. Potensi pembengkakan subsidi ini sangat mungkin membebani APBN Tahun Anggaran 2013. Sebagaimana diketahui, alokasi anggaran subsidi BBM jenis tertentu tahun 2013

mencapai Rp. 193,8 triliun. Dalam kondisi tersebut, dibutuhkan kebijakan konkret untuk melakukan pengendalian konsumsi BBM Bersubsidi. Pemerintah seharusnya menyiapkan opsi untuk menghadapi skenario dalam upaya pengendalian jumlah konsumsi yang difokuskan pada dua opsi, yaitu penghematan dan pembatasan penggunaan BBM Bersubsidi.

Namun, bila pada akhirnya Pemerintah mempersiapkan opsi kenaikan harga BBM dalam rangka memperbaiki kondisi fiskal dan moneter, Dewan meminta jaminan kepada Pemerintah bahwa opsi tersebut tidak akan berdampak besar terhadap perekonomian nasional. Pemerintah perlu menyiapkan perencanaan secara matang dan terukur. Upaya yang harus diambil terkait energi BBM, harus bersifat komprehensif dengan perencanaan jangka menengah dan panjang, terkait dengan program pengembangan energi baru terbarukan.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Di bidang ekonomi, masyarakat prihatin dengan melonjaknya harga komoditas pangan, seperti daging sapi, bawang putih, bawang merah, dan cabai. Dewan menyayangkan lambatnya antisipasi terhadap gejolak harga oleh Kementerian terkait, sehingga berdampak luas bagi perekonomian masyarakat.

Dewan berpendapat, permasalahan komoditas pangan saat ini tidak dapat disederhanakan hanya disebabkan oleh adanya kelangkaan dan kenaikan harga saja. Perlu diketahui bahwa permasalahan daging sapi, bawang, dan produk pangan lainnya, merupakan "lahan empuk" yang dimanfaatkan oleh para pedagang dan sebagian importir untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa harus bekerja keras.

Di sisi lain, terhadap permasalahan pangan ini, Kementerian terkait tidak memberi perhatian serius dan tidak memberikan insentif untuk mengembangkan sektor pertanian. Pada kenyataannya, usaha pertanian dan peternakan tidak memberi gairah dan nilai tambah kepada petani, padahal selama ini Indonesia merupakan negara agraris, namun justru mengimpor komoditas tersebut.

Sektor pertanian merupakan sektor yang utama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, dimana faktor produksi, ketersediaan, distribusi dan keterjangkauan menjadi

acuan. Untuk itu Dewan mendesak agar segera ada kebijakan untuk merevitalisasi sektor pertanian dan membenahi tata-niaga yang selama ini diperkirakan dikuasai oleh kartel dalam perdagangan komoditas pertanian. Hal ini perlu dibahas dalam UU yang sedang dibahas di DPR. Selain itu, Dewan menekankan pentingnya pemerintah segera memperbaiki regulasi impor produk hortikultura dan pangan, secara keseluruhan. Dewan menyoroti dan mempertanyakan peran Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan yang seharusnya sudah memantau kemungkinan gangguan produksi, seperti gangguan cuaca, hama, dan lain-lain, sehingga bila terpaksa impor sudah diketahui sejak awal.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Berbagai permasalahan bangsa mengemuka akhir-akhir ini, terutama yang sangat menonjol dalam bidang politik-keamanan. Di bidang politik adalah persiapan Pemilu 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Permasalahan yang cukup mendapat perhatian Dewan adalah hubungan antar lembaga penyelenggara Pemilu karena sempat terjadi perbedaan pandangan antara KPU dengan Bawaslu, yang pada akhirnya atas keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, KPU meloloskan dua partai politik untuk ikut serta dalam Pemilu 2014 yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

DPR-RI menegaskan, agar lembaga penyelenggara Pemilu senantiasa mengedepankan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga setiap permasalahan akibat perbedaan pandangan dapat diselesaikan secara adil dan objektif. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus arif dan bijak, dalam menyikapi dinamika hubungan kelembagaan antara KPU dengan Bawaslu. Jangan sampai ada kesan antar lembaga penyelenggara Pemilu saling menjatuhkan antara satu dengan lainnya. Hubungan kelembagaan yang baik, sinergis dan berkualitas antar lembaga penyelenggara Pemilu, merupakan salah satu faktor terpenting bagi kelancaran penyelenggaraan Pemilu tahun 2014.

Pada sisi lain, Peraturan KPU tentang persyaratan kuota perempuan juga masih menimbulkan polemik di DPR. Fraksi-fraksi memandang bahwa, KPU salah dalam memahami dan menterjemahkan UU tentang masalah kuota perempuan.

Di bidang keamanan, masyarakat dan kita semua, dibuat resah oleh aksi kekerasan yang terjadi pada bulan-bulan terakhir, seperti tewasnya Kapolsek Dolok Pardamean, Andar Siahaan yang dikeroyok massa pada saat melakukan penggerebekan judi togel. Peristiwa lain adalah penyerbuan yang dilakukan oleh gerombolan bersenjata dan dibunuhnya empat tahanan titipan Polda DIY di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 2B Cebongan, Jogjakarta. Juga penyerangan oknum Anggota TNI atas Kantor Polres OKU beberapa waktu yang lalu, yang tidak puas atas proses hukum penembakan anggota TNI oleh anggota Polisi setempat.

Berbagai peristiwa kekerasan berdarah tersebut telah merusak wibawa hukum di negara kita. Peristiwa penembakan harus diungkap dengan tuntas, pelakunya harus dihukum berat, siapapun mereka.

Kita semua, seluruh masyarakat Indonesia, bernafas lega, akhirnya Tim Investigasi Angkatan Darat yang mendapat tugas untuk menangani kasus Cebongan, telah berhasil menjalankan tugas dalam waktu yang singkat. Dewan memberikan apresiasi atas kerja Tim Investigasi TNI AD tersebut. Masyarakat menunggu proses hukum yang jelas, jujur dan transparan. Namun demikian, proses hukum yang akan dilakukan, jangan melupakan akar permasalahan, yaitu premanisme, yang menjadi tanggung jawab kita untuk dituntaskan. Negara tidak boleh dikuasai oleh hukum rimba, dimana kaidah hukum formal tidak lagi menjadi pegangan masyarakat.

Di sisi lain, kita dikejutkan dengan kejadian amuk massa di Palopo baru-baru ini. Hal ini sangat memprihatinkan kita. Kejadian ini menunjukkan bahwa masyarakat setempat mudah terhasut untuk melakukan tindakan anarkhis. Peristiwa ini dipicu oleh ketidaksiapan salah satu pasangan calon untuk menerima kekalahan. Sementara itu, aparat keamanan tidak menunjukkan kesiapannya untuk mengantisipasi kejadian dengan minimnya personel. Kekecewaan atas proses PemiluKada, seharusnya disalurkan melalui proses hukum dan bukan justru sebaliknya, membakar emosi massa dengan melakukan tindakan anarkhis.

Masih berkaitan dengan penegakan hukum, masalah premanisme dan kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat seperti mutilasi, kekerasan seksual terhadap anak, perampokan disertai pembunuhan, dan sebagainya, harus ditangani secara tuntas agar kepercayaan masyarakat kepada aparat keamanan dan Pemerintah dapat pulih kembali.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Permasalahan politik yang krusial lainnya adalah penanganan masalah terorisme atau perbuatan melawan hukum di tanah Papua. Sebagaimana kita ketahui, beberapa waktu yang lalu ada delapan Anggota TNI tewas dalam aksi penembakan di Papua. Dewan menghimbau, penanganan terhadap masalah-masalah di Papua segera dievaluasi dan ditingkatkan kualitasnya, mengingat masih saja berlangsung penembakan oleh kelompok bersenjata terhadap Aparat TNI, Polri dan masyarakat.

Persoalan Papua menjadi sangat kompleks, dimana yang terjadi tidak hanya terkait dengan masalah keamanan saja, tetapi juga masalah sosial, ekonomi, politik yang berhubungan satu sama lain. Ini adalah masalah serius yang harus segera diatasi demi stabilitas politik dan keamanan nasional.

Dalam hal ini Dewan menilai, setidaknya ada dua kunci yang harus dijadikan acuan dalam mengatasi permasalahan di Papua. *Pertama*, meningkatkan pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidup di bidang pendidikan, kesejahteraan, dan kesehatan. *Kedua*, menghilangkan marjinalisasi dan diskriminasi pada masyarakat asli Papua. Selain itu, Dewan juga mendorong Tim Pemantau Otonomi Khusus Papua untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam hal mengawasi implementasi Otonomi Khusus di Papua. Kelemahan-kelemahan yang ada dalam praktek Otonomi Khusus Papua, hendaknya segera ditindaklanjuti agar dapat diperbaiki secepat mungkin, dan proses ini harus dilaksanakan secara simultan dan berkelanjutan.

Penyelesaian yang baik terhadap masalah di Papua, sebagaimana penyelesaian terhadap persoalan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh, sesungguhnya akan menjadi prestasi yang luar biasa. Meskipun berbeda dasar persoalan dan cara penyelesaiannya, kita berharap, kondisi dan situasi di Papua akan aman dan damai sebagaimana di Aceh. Namun demikian, perdamaian yang telah dicapai di Aceh tersebut, jangan pula dirusak oleh kepentingan politik sesaat sebagaimana keinginan untuk memunculkan kembali simbol, bendera dan lambang GAM. Untuk mendukung perdamaian dan kedamaian di Aceh dengan telah ditandatanganinya Nota Kesepahaman Helsinki, maka keinginan dari sebagian masyarakat Aceh menggunakan simbol, bendera dan atribut GAM sebagai simbol Aceh, harus dievaluasi. Pemerintah Provinsi Aceh harus mematuhi Nota Kesepahaman Helsinki yang melarang penggunaan simbol-simbol kelompok.

Masih berkaitan dengan masalah penegakan hukum dan khususnya pemberantasan korupsi, Pimpinan Dewan memberikan apresiasi atas hasil kerja Komite Etik yang telah berhasil menyelesaikan tugas menyelidiki kasus bocornya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) tersangka Anas Urbaningrum. Hasil ini diharapkan menjadi pembelajaran dan tidak lantas mengendurkan intensitas kinerja KPK sebagai salah satu lembaga pemberantas korupsi. Soliditas kerja Pimpinan KPK harus tetap terjaga, sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat dalam penyelesaian pemberantasan korupsi di negeri ini.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Beberapa Alat Kelengkapan Dewan telah bekerja intensif, diantaranya Badan Legislasi yang telah melakukan harmonisasi atas beberapa RUU dan menyusun beberapa RUU baru yang akhirnya ditetapkan menjadi RUU DPR-RI. Terakhir adalah RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.

Badan kehormatan DPR-RI juga telah melakukan kegiatan cukup padat, dalam upaya menegakkan citra DPR sebagai lembaga. Pimpinan mengharapkan, Ketua Badan Kehormatan yang baru, Trimedya Panjaitan yang menggantikan M. Prakosa, akan bekerja lebih maksimal di dalam menjaga nama baik DPR-RI.

Badan Urusan Rumah Tangga DPR-RI pada Masa Persidangan III telah melaksanakan tugas membantu pimpinan, baik dalam rangka rencana penyusunan anggaran DPR-RI dan Sekretariat Jenderal, melakukan pengawasan, maupun kegiatan lain yang ditetapkan Tata Tertib. Bentuk kegiatan antara lain, dilakukannya *Workshop* BURT pada pertengahan Februari di Semarang, dan di Bali pada akhir Maret, dengan tema "Penguatan Kinerja Kelembagaan DPR-RI Melalui Peningkatan Peran, Kapasitas dan Kompetensi Anggota DPR-RI". Workshop menghadirkan para pakar sebagai narasumber, dan menghasilkan beberapa rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja DPR.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Menghadapi tantangan di tingkat kawasan dan global, Dewan mendorong Pemerintah untuk terus meningkatkan upaya diplomasi demi kepentingan nasional. Diplomasi Indonesia harus senantiasa memperjuangkan kepentingan nasional yang berkontribusi bagi

pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan rakyat, konsolidasi demokrasi di tanah air, dan tercapainya keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Di era perdagangan bebas saat ini, diplomasi ekonomi merupakan bagian tak terpisahkan dari politik luar negeri Indonesia. Dewan meyakini perwakilan Indonesia di luar negeri adalah tulang punggung upaya diplomasi ekonomi Indonesia. Oleh sebab itu, upaya meningkatkan hubungan ekonomi di sektor perdagangan dan investasi harus menjadi salah satu prioritas diplomasi Indonesia. Dengan demikian, harapan untuk memperdalam dan memperluas pasar tradisional Indonesia kepada pasar non-tradisional dapat terwujud.

Untuk kepentingan tersebut, Dewan meminta Kementerian Luar Negeri untuk lebih berperan aktif memfasilitasi pemasaran produk-produk nasional di pasar internasional, serta meningkatkan upaya perlindungan dan pembelaan terhadap produk-produk nasional bilamana terjadi terjadi pencekalan, sehingga produk-produk nasional dapat lebih kompetitif dalam pasar internasional dalam rangka mendukung politik luar negeri yang lebih berorientasi pada masalah ekonomi.

Selain itu, Dewan meminta pemerintah untuk lebih meningkatkan fungsi komunikasi publik, khususnya terhadap bentuk-bentuk disinformasi tentang Indonesia di luar negeri. Diplomasi kita harus mampu menampilkan citra yang baik mengenai Indonesia dengan memberikan pemahaman yang benar tentang situasi dan kondisi yang terjadi di tanah air.

Berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan Komunitas ASEAN pada tahun 2015, Dewan berharap agar Pemerintah Indonesia bersama dengan Pemerintah negara anggota ASEAN lainnya, dapat saling membantu, demi terciptanya perdamaian dan keamanan pada setiap konflik yang terjadi di antara sesama anggota. Dewan turut prihatin atas insiden berdarah di Sabah yang melibatkan Pemerintah Malaysia dan Filipina, juga terjadinya kerusuhan berdarah yang melibatkan kelompok masyarakat minoritas dan otoritas keamanan di Myanmar, yang justru menimbulkan ketegangan baru dan memunculkan kembali permasalahan kekerasan di Myanmar.

Dewan menghimbau seluruh pemimpin ASEAN lainnya untuk dapat menemukan jalan keluar yang baik, membangun dialog yang kondusif bagi pihak-pihak bertikai untuk tercapainya perdamaian di wilayah ASEAN.

Kegiatan diplomasi Parlemen lainnya, diwujudkan dalam bentuk kunjungan parlemen negara-negara sahabat sebagai tamu DPR-RI, antara lain kunjungan delegasi Parlemen Polandia, Parlemen Korea Selatan, Parlemen Sudan, Parlemen Bahrain, Parlemen Serbia, Parlemen Ekuador, delegasi Komisi Luar negeri dan kelompok Persahabatan Parlemen Aljazair-Indonesia, dan kelompok Persahabatan Parlemen Thailand-Indonesia.

DPR-RI juga telah mengirim delegasi ke beberapa konferensi regional maupun internasional, diantaranya *The 8th Session of Parliamentary Union of the OIC Member State (PUIC) Conference* di Sudan, *The 21st Meeting of Asia Pacific Parliamentary Forum* di Vladivostok, *The 5th Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) Conference* di Manila, *The 128th Assembly of the Inter-Parliamentary Union (IPU)* di Quito Ekuador, *The 4th Speaker Consultation Forum of G-20* di Mexiko, serta pengiriman berbagai GKS DPR-RI dengan parlemen negara-negara sahabat.

Delegasi *The 128th Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly and related meetings* di Quito–Ecuador yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR-RI Bidang Korinbang, telah menyampaikan posisi Indonesia yang mendukung diskusi global yang komprehensif dalam pembentukan rencana induk untuk Pembangunan Pasca-2015. Pada kesempatan ini, Indonesia kembali menunjukkan peran aktifnya dalam organisasi IPU dengan terpilihnya H. Andi Anzhar Cakra Wijaya, SH. (Wakil Ketua BKSAP/Fraksi-PAN) sebagai *President of the Committee to Promote Respect for International Humanitarian Law* dan Dra. Hj. Herlini Amran (F-PKS), sebagai Anggota *Committee on Middle East Question*.

Selain itu, DPR-RI juga mendukung pertemuan anggota parlemen dari negara-negara Asia Pasifik dalam forum *Asia and the Pacific Parliamentarians and CSO Forum on MDGs Acceleration and the Post 2015 Development Agenda* di Bali, pada tanggal 25-26 Maret 2013. Pertemuan ini diselenggarakan bertepatan dengan penyelenggaraan *The Fourth Meeting of the High Level Panel of Eminent Persons (HLPEP) on Post 2015 Development Agenda* pada tanggal 24-27 Maret 2013.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Berbagai kegiatan tersebut merupakan implementasi fungsi dan tugas DPR yang berusaha dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Namun demikian, ada satu hal yang

meminta perhatian kita semua, khususnya mengenai kemitraan antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam mengemban amanat rakyat.

Dewan merasa kecewa atas ketidakhadiran mitra kerja dalam rapat-rapat DPR, seperti ketidakhadiran Menteri BUMN. Hal ini dinilai penting untuk dikemukakan, mengingat sempat terjadi beberapa kali peristiwa yang sangat mengganggu harmoni kemitraan antara DPR-RI dengan Pemerintah. Oleh karena itu, Dewan merasa perlu mengingatkan agar hubungan antar-lembaga negara, khususnya antara DPR-RI dengan Pemerintah, dapat dijaga, dengan dilandasi oleh sikap saling menghormati dan menghargai kapasitas, wewenang dan fungsi masing-masing.

Demikianlah Pidato Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2012-2013. Selanjutnya, Pimpinan Dewan mengucapkan selamat bertugas untuk Masa Reses, yang akan berlangsung dari tanggal 12 April sampai 12 Mei 2013. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh.

Jakarta, 12 April 2013

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Dr. H. Marzuki Alie